

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM KEMITRAAN PTPN VII DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (Studi Pada UMKM Desa Tanjung Sari, Natar, Lampung Selatan)

**Oleh
Ayu Riskylia Melati**

Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) disebutkan BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 Tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Program Kemitraan merupakan program pembinaan usaha kecil oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan dari Program Kemitraan tersebut adalah Membantu sektor UMKM dengan bantuan permodalan melalui pinjaman dana, Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat, dan Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bentuk pelatihan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah derajat kepercayaan, keteralihan, dan kepastian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketercapaian tujuan dari Program Kemitraan PTPN VII belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan dari tiga indikator Evaluasi Program, tiga diantaranya yaitu tujuan, hasil dan sasaran sudah dilaksanakan cukup baik, dan juga terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan. Program Kemitraan PTPN VII, yaitu ketidakdisiplinan para pelaku usaha terkait pembayaran angsuran tiap bulannya, dan kurangnya SDM yang menghandel program tersebut. Rekomendasi yang peneliti berikan, yaitu PTPN VII Unit Rejosari-Pematang Kiwah, diharapkan memiliki divisi khusus untuk menangani program kemitraan, sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik dan juga memiliki sistem kepengurusan yang fokus menangani peminjaman dan kemitraan, serta diharapkan untuk PTPN VII Unit Rejosari-Pematang Kiwah, dalam peminjaman dana tersebut dapat lebih tegas terhadap para mitra binaan yang tidak disiplin terkait pembayaran angsuran bulanan.

Kata Kunci: Evaluasi, Program Kemitraan

ABSTRACT

EVALUATION OF THE PTPN VII PARTNERSHIP PROGRAM IN THE DEVELOPMENT OF THE MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS SECTOR (Study onUMKM in Tanjung Sari Village, Natar, South Lampung)

**By
Ayu Riskylia Melati**

In Article 88 paragraph (1) of law No.19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN Law)it is stated that BUMN can set aside a portion of their net profit for the purpose of fostering small businesses/cooperatives and fostering the community around BUMN. Minister of SOE Regulation Number: PER-09/MBU/07/2015 dated 03 July 2015 concerning the partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises. The Partnership Program is a small business development program by BUMN through the use of fund from a portion of the profits of State-Owned Enterprises (BUMN). The objectives of the Partnership Program are to assist the UMKM sector with capital assistance through loan funds, to improve the economy and community income, and to uncrease community capacity in the form of training.

The type of research used in this study is a descriptive type with a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusions. The data validity technique used is the degree of trustworthiness,tranferability, and certainty. The results of this study indicate that the achievement of the objectives of the PTPN VII Partnership Program has not been maximized. This is because of the three Program Evaluation indicators, three of which are objectives, results and targers that have been implemented quite well, and there are also obstacles faced in the implementation of the PTPN VII Partnership Program, namely tha indiscipline of business actors regarding monthly installment payments, and the lack of adequate human resources, handle the program. The recommendation that the researcher gave, namely PTPN VII Rejosari-Pematang Kiwah Unit, is expected to have a special division to handle the partnership program, so that the program can run well and also has a management system that focuses on handling loans and partnership, and it is hoped that PTPN VII Rejosari-Pematang Kiwah, in borrowing these funds, can be more assertive towards fostered partners who are not disciplined regarding monthly installment payments.

Keywords: Evaluation, Partnership Program.